



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia  
Telepon.3500901; Fax. 3521967

**NOTULEN RAPAT TIM  
PELAKSANA EITI**

- Hari/Tanggal : Senin, 20 Februari 2017  
Waktu : 13.30 – 15.30 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Utama Lantai 4, Gedung Ali Wardhana,  
Kemenko Perekonomian, Jl. Lapangan Banteng Timur  
No.2-4, Jakarta Pusat
- Agenda
1. Penyampaian Draft Final Laporan EITI 2014
  2. Pembahasan Roadmap *Beneficial Ownership* (BO)
  3. Pembahasan Rencana Pengembangan EITI Daerah
- Peserta Rapat Pemerintah :
1. Kementerian Perekonomian, Kedeputian III: Bastian H, Agus Haryanto, Syaiful Mujab, Nurwachid
  2. Setjen ESDM: Fajar Cahyono, Tegar rahardian
  4. Ditjen Migas, Kementerian ESDM: Tobia pasaribu
  5. Ditjen Pajak, Kemenkeu : Ahmad Zaky Zamani, Chenris C
  6. Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu: Adijanto, Sigit Harjanto
  7. Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu: Bambang RR, Mulyono
  8. Ditjen Anggaran: Kemenkeu: Robby Martaputra, Seprina Hasan
  9. BPKP:Sri Madihas Tuti
  10. SKK Migas: Selvi
- Pemerintah Daerah : Dinas ESDM Kaltim: Amrullah
- Asosiasi Industri dan Perusahaan :
- APBI-ICMA: Supriatna Suhala  
IMA : Mukhlis  
Pertamina: Yogi Utomo
- Masyarakat Sipil : PWYP dan koalisi: Aryanto Nugroho, Meliana
- Bank Dunia : Noriko T, Prasetya
- Sekretariat EITI : Edi Effendi, Ronald Tambunan, Agus Trianto, Doni Erlangga, Andrian, Anggi Gartika, Astari, Arief
- Ernst and Young (EY) : Izhari, Liliana, Dwi Wijayanti, Dinar, Ika M, Inez, Antania, David, Phebe, Gracia

## A. PEMBUKAAN

Asisten Deputi Industri Ekstraktif selaku Koordinator Nasional EITI, Bpk Bastian Halim membuka rapat dan kemudian menyampaikan permintaan maaf karena Ketua Tim Pelaksana EITI, Bpk Montty Girianna memiliki agenda lain yaitu menyeleksi calon Pejabat Eselon II sehingga tidak dapat memimpin rapat. Bpk Bastian kemudian menyampaikan agenda rapat yaitu progress penyelesaian Laporan EITI 2014 agar status Indonesia sebagai anggota EITI tak terkena suspensi, perkembangan pelaksanaan transparansi *Beneficial Ownership* (BO) dimana akan dilaksanakan rapat tentang BO pada tanggal 2 Maret 2017, dan agenda terakhir yaitu rencana pengembangan EITI daerah. Bpk Bastian mempersilahkan Ketua Tim Sekretariat EITI, Bpk Edi Tedjakusuma untuk menyampaikan agenda selengkapnya. Bpk Edi menyampaikan bahwa sebenarnya hanya ada satu agenda utama yaitu penyelesaian laporan EITI 2014 agar akhir bulan ini bisa dipublikasikan. Agenda tambahan yaitu untuk koordinasi roadmap BO agar agenda BO bisa dilaksanakan. Agenda lainnya yaitu pembahasan rencana EITI daerah agar dapat segera dilaksanakan. Untuk agenda utama yaitu pembahasan Laporan EITI, minggu sebelumnya Sekretariat telah berdiskusi dengan Tim Teknis EITI sehingga kalau ada masukan, harus bersifat minor. Apabila ada masukan yang besar harus didraft oleh yang mengusulkan. PT Ernst and Young sudah bekerja keras sehingga harus diapresiasi. Laporan kontekstual sampai 19 Februari sudah 80 persen, untuk laporan rekonsiliasi diharapkan sedetil mungkin. Sampai tanggal 10 Februari, data perusahaan migas sudah seluruhnya yaitu 71 perusahaan, sedangkan minerba 70 perusahaan dari 119 perusahaan yang wajib lapor. Sekretariat telah minta list yang perusahaan yang menyerahkan laporan dan juga yang tidak. Laporan akan disampaikan juga ke KSP, Bappenas, dan KPK yang bersama EITI menjadi bagian dari aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK).

## B. PEMBAHASAN

### 1. Penyampaian Draft Final Laporan EITI 2014

Disampaikan oleh Bpk Izhari Mawardi. PT Ernst and Young (EY) sebagai Independent Administrator (IA) terus bekerja untuk menyelesaikan Laporan EITI 2014 dengan tenggat waktu hingga akhir Februari 2017. Progress penyelesaian laporan disampaikan EY dalam rapat. Laporan EITI terbagi menjadi laporan kontekstual dan laporan rekonsiliasi. Penyelesaian laporan kontekstual sudah mendekati 95% atau langkah yang kurang yaitu memasukkan grafis untuk laporan kontekstual yang dibagi menjadi 6 bagian yaitu: pendahuluan dan latar belakang, tata kelola industri ekstraktif, proses perizinan dan penetapan wilayah kerja migas dan wilayah pertambangan minerba, pengelolaan industri ekstraktif di Indonesia, pengelolaan penerimaan negara dari industri ekstraktif, Badan Usaha Milik Negara, tanggung jawab lingkungan hidup dan sosial.

Presentasi Laporan Rekonsiliasi disampaikan oleh Ibu Liliana. Penyelesaian laporan rekonsiliasi masih terhambat dengan sejumlah perusahaan yang tidak/belum menyerahkan template laporan EITI ke Sekretariat EITI. Untuk perusahaan operator di sektor migas, dari entitas pelapor 71 perusahaan operator telah terkumpul semua. Sedangkan perusahaan mitra telah terkumpul 94 laporan dari entitas pelapor 104 perusahaan. Untuk sektor minerba, dari 119 perusahaan baru terkumpul 73 laporan perusahaan. Hal itu disebabkan masih banyaknya perusahaan pemegang IUP yang tidak/belum melapor yaitu dari 46 perusahaan yang belum/tak melapor, 43 perusahaan adalah pemegang IUP. Walaupun banyak yang belum melapor, namun nilai royalti dan PHT dari 46 perusahaan yang tak melapor hanya 7,79 % dari total penerimaan royalti dan PHT untuk sektor minerba. Untuk instansi pemerintah, dari 7 instansi yang telah memberikan laporan 7 instansi atau telah 100% dengan catatan khusus pajak belum semua karena disampaikan parsial sesuai terkumpulnya surat otorisasi perusahaan. Untuk Pemerintah Daerah telah 100 % atau 3 provinsi, yang menyerahkan laporan tentang Dana Bagi hasil (DBH) yaitu Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Riau. Untuk penerimaan migas yang masih direkonsiliasi masih menunggu dari KKKS sehingga masih bisa dikurangi discrepansinya. Untuk rekonsiliasi sektor minerba masih akan diperbaiki karena masih banyak yang salah memasukkan pajak dan royalti. Untuk transportasi kepada BUMN terdapat masalah PT KAI menyampaikan dalam angka invoice bukan dalam bentuk penerimaan negara, sehingga ada perbedaan 7%, sehingga ditindaklanjuti dengan meminta bukti bayar dari PT BA.

Rekomendasi laporan EITI ada 4 yaitu: Belum ada standarisasi pengukuran dampak dari pengeluaran terkait tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan, Belum dilakukannya pemutakhiran data perusahaan secara periodik khususnya minerba, Pelaksanaan Penyusunan Laporan EITI sebaiknya tidak dilakukan pada periode penyusunan laporan tahunan perusahaan, dan Sample provinsi atas data DBH yang selalu sama yaitu Jawa Timur, Riau, dan Kalimantan Timur.

## Tanggapan:

Bpk Bastian menyampaikan agar EY mengidentifikasi setiap masukan agar pertanyaan yang serupa tidak akan muncul lagi.

EY: Untuk beberapa masukan masalah grafik sudah diikuti. Untuk beberapa rekomendasi terkait Pusdatin migas dan MOMI juga sudah dimasukkan, roadmap *Beneficial Ownership* sudah tapi garis besar, untuk peserta lelang masih belum ditindaklanjuti dan memohon masukan karena EY tak punya datanya.

Bpk Bastian menanyakan apakah ada pengaruhnya apabila selisihnya besar atau kecil, apabila tak berpengaruh langsung dilanjutkan saja.

Bpk Edi: Dalam kesepakatan gapnya 5 persen apabila lebih harus dicari sebabnya. Apabila sampai batas waktu masih 5 persen gapnya harus dijelaskan. Tapi mudah-mudahan gap di bawah 5 persen.

Bu Selvi (SKK Migas): Di data migas ada *firm commitment* tapi di laporan rekonsiliasi tidak ada *firm commitment*.

Pak Tobia (Ditjen Migas): Untuk data peserta lelang bisa dibuka, sesuai persetujuan tahun lalu. Harus mengajukan surat ke Pak Dirjen.

Aryanto (PWYP): Permasalahan adalah membuka data lelang dengan waktu yang terbatas.

Tobia: Untuk mempersingkat waktu, dapat dilakukan secara paralel bisa melalui email dulu. Pembukaan data lelang sekalian dengan *firm commitment* ditujukan ke Dirjen.

Bpk Mukhlis (IMA): Menyoroti editorial Bahasa Indonesia, misal imbuhan di disambung atau dipisah. Istilah-istilah Bahasa Inggris harus italic, dan terutama titik atau koma untuk menunjukkan angka ribuan, titik untuk bahasa Indonesia dan koma untuk bahasa Inggris.

PWYP: Laporan rekonsiliasi ada yang telah melapor dan belum melapor sepertinya masih ada yang salah angka. Presentase yang harus bertambah malah turun karena salah memasukkan yang telah melapor tapi malah yang dimasukkan yang belum melapor. Kenapa data yang direklamasi hanya data PKP2B, kenapa IUP tidak. Bisa ditambahkan paragraf untuk menjelaskannya.

Bpk Aryanto: Ada kata rekonsiliasi adalah proyek Tim Pelaksana, kalau bisa kata proyeknya dibuang karena kesannya negatif. Untuk validasi ukurannya standar EITI yang dicocokkan antara Standar EITI dan pelaksanaan di laporan. Ringkasan eksekutif harus merefleksikan bab perbabnya. Untuk soal kontrak perlu elaborasi dengan UU KIP Pasal 17 sampai 20. Untuk kasus sengketa informasi seperti di Laporan 2012-2013 kontrak PSC tak bisa dibuka karena BP Migas banding ke PTUN, tapi untuk Kontrak Karya, dan PKP2B bisa dibuka karena Kementerian ESDM tidak banding ke PTUN. Untuk data kadaster, bisa dimasukkan langkah-langkah untuk pembukaan data kadaster..

Bu Selvi meminta file format MS Word untuk membantu merevisi dan langsung memberikan masukan.

Bpk Zaki (DJ Pajak): Tentang laporan kontekstual ada kesalahan minor yaitu Pajak DBH, yang benar adalah DBH Pajak. Rekonsiliasi masih ada harapan diperkecil gapnya. Kalo ada NTPN, lebih mudah mencarinya. Dari komunikasi terakhir ada beberapa perusahaan yang memberikan data penerimaan, tapi NTPNnya tidak, jadi sulit mencarinya. Kalau tak ada NTPN dengan waktu terbatas cukup menghambat.

Bpk Edi: Tahun lalu tidak memakai NTPN tapi waktu panjang, sehingga tahun ini untuk pelajaran ke depannya.

Bpk Aryanto: Ada usulan untuk perusahaan minerba yang tak melapor, dapat juga disampaikan atau direkomendasi untuk pembinaan/sosialisai perusahaan yang tak lapor karena EITI juga ikut aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) bersama KPK, KSP dll

Bpk Edi: Dengan perbaikan ini, kita tak perlu ada Rapat Tim Pelaksana lagi tapi harus ada persyaratan untuk menunjukkan persetujuan sehingga apabila setuju harusstanda tangan, apabila masih ada catatan dapat dilampirkan. Bpk Montty meminta persetujuan tertulis, tapi karena waktu mepet sehingga perlu ditanda tangan sekarang, dengan catatan dapat dilampirkan.

Bpk Aryanto mengusulkan format untuk catatan diemail saja formatnya karena catatan bisa berbeda-beda.

Bu Selvi: Untuk dokumen kontrak PKP2B dan Kontrak Karya yang bisa dibuka, bisa dimasukkan saja direkomendasi saja daripada hanya sekedar catatan. Bpk Edi: Bisa disampaikan untuk rekomendasi, khusus untuk dokumen PSC tak bisa karena ada banding dari BP Migas ke PTUN. Mohon dokumen persetujuan ditanda tangan agar ada pegangan dari Sekretariat untuk mempublikasikan laporan EITI. .

Bpk Robby (DJA): Saya baru datang 2 kali dan belum membaca Laporan, memohon untuk tanda tangan dimundurkan.

Bpk Edi: Silahkan dibaca sampai besok, sampai ada masukan. Namun dari keputusan Timlak sebelumnya hari ini adalah pengambilan persetujuan. Sebetulnya yang krusial telah dibahas, untuk DJ Anggaran sebenarnya tak begitu banyak masalah karena kebanyakan masalah ada di pembahasan Kontrak dll. Kita berikan batas waktu sampai besok (selasa) untuk catatan dan rabu diharapkan tanda tangan persetujuan. Kalau yang tak ada permasalahan bisa ditandatangani hari ini.

Catatan:

1. Data tentang *list of bidder*/peserta kontrak dan *firm commitment* akan disampaikan oleh pihak Ditjen Migas.
2. Laporan supaya menggunakan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar
3. Cut off rekonsiliasi untuk data penerimaan pajak (PPH Badan) sampai tanggal 21 Feb 2017
4. Cut off NTPN sampai 21 Februari 2017
5. Masukan-masukan yang bersifat minor masih bisa disampaikan sampai tanggal 21 Feb 2017 jam 19.00 WIB

## **2. Pembahasan Roadmap *Beneficial Ownership* (BO)**

Bpk Edi: Roadmap BO telah selesai dan akan mulai dilaksanakan. Pada tanggal 2 Maret akan dilaksanakan rapat Koordinasi BO dengan agenda penyampaian hasil roadmap BO EITI dan penyampaian kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan masing-masing instansi dalam pelaksanaan BO. Roadmap BO telah menyebutkan langkah-langkah pelaksanaan roadmap antara tahun 2017-2019 tapi masih menunggu masukan dari beberapa instansi seperti KPK. Masukan tersebut untuk menentukan siapa penanggungjawab untuk tiap langkah dan apakah instansi-instansi yang terlibat BO apakah menyetujui. Langkah-langkah dalam roadmap (lihat di presentasi) bisa berkurang, bisa bertambah, atau bisa berubah sesuai rapat. Dibutuhkan juga komitmen masing-masing pihak untuk melaksanakan langkah-langkah dalam roadmap. Roadmap dapat diunduh di website EITI.

Bpk Aryanto: Selain undangan, roadmap juga dapat disampaikan di petinggi masing-masing instansi dan dapat dilakukan siaran pers dan launching roadmap.

Bpk Edi : Launching akan dibahas pada pertemuan selanjutnya karena kita juga berencana melaunching Laporan EITI.

## **2. Pembahasan Rencana Pengembangan EITI Daerah**

Bpk Edi : Banyak Pemerintah daerah yang tak memiliki data penerimaan di daerahnya. Dasar hukum pelaksanaan EITI Daerah adalah Perpres 26/2010. Kalau EITI Nasional hanya memonitor sekitar 120 perusahaan lainnya kita belum. Akses untuk mendapatkan informasi kepada perusahaan sering kali cukup sulit bagi Sekretariat EITI dan Daerah juga sering kesulitan mendapatkan data dan kesulitan penghitungan DBH.

Tujuan EITI Daerah: Meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam upaya transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif, Memfasilitasi pemda untuk mendapatkan data dan informasi terkait industri ekstraktif yang ada di daerahnya masing-masing sehingga dapat digunakan oleh pemda dalam perencanaan program di daerah, Mendorong transparansi tata kelola industri ekstraktif di daerah dan di tingkat nasional. Lingkup EITI Daerah yaitu: Menyusun data dan informasi terkait perusahaan industri ekstraktif yang diluar kriteria *materiality threshold* di masing-masing wilayah dan membantu perolehan data dan informasi perusahaan yg wajib melapor (diatas kriteria *materiality threshold*) tetapi belum tercatat dalam laporan EITI. Apabila setuju mulai bulan depan akan dilaksanakan FGD di daerah untuk dua atau tiga Provinsi tergantung anggaran. Harus ada revisi Perpres

untuk melakukan ini. Setelah itu daerah akan diundang untuk workshop di Jakarta. Diharapkan tahun depan sudah ada rintisan untuk pelaksanaan EITI Daerah di tiga Provinsi.

#### **Tanggapan:**

Bpk Aryanto: EITI dapat menggunakan Kabupaten Bojonegoro dan Blora sebagai referensi karena telah melakukan dengan pembuatan Perda.

Bpk Robby : Dari ruang lingkup nanti bisa mengcover yang belum bisa tercover Pemerintah Pusat terutama Minerba karena Migas sudah. Walaupun kita sudah transparan, tapi Daerah pasti menuntut untuk lebih transparan. Jangan sampai daerah mengambil porsi pusat dan meyakinkan daerah untuk mampu melakukan jangan hanya perusahaan yang besar-besar seperti porsi Pemerintah Pusat.

Bpk Edi: Pembagian tugas antara pusat dan daerah harus jelas, migas tak harus dilakukan kalau sudah tercover pusat. Teman-teman daerah memang ingin mengetahui kontrak dan transparansi lainnya. Karena harus ada keterbukaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Bpk Robby: Harus dilakukan inventarisasi, jangan sampai apa yang belum didapatkan Pemerintah Daerah sebenarnya bisa didapatkan.

Bpk Aryanto: Blora tak punya sumur tetapi mereka ada Perda transparansi. Yang dipentingkan adalah diskusi dan duduk bersama antara pemerintah, kontraktor, dan elemen masyarakat lain dalam pengelolaan. Masalah datanya apa saja bisa didiskusikan.

Bpk Robby: Sebenarnya ESDM telah rutin melakukan diskusi apabila ada sesuatu yang kurang. Permasalahannya pembagian porsi harus jelas dan tidak redundant.

Pak Edi: Kami membatasi ke perusahaan jangan sampai yang dilaporkan sama dengan pemerintah pusat. Substansi di Pusat sesuai Standar EITI, apakah di Daerah akan disamakan atau tidak semuanya mengacu ke Standar EITI. Harus ada diskusi tentang ini di FGD kecil yang akan dilakukan. Setelah sepakat baru Sekretariat EITI berkunjung ke daerah.

#### **C. PENUTUP**

Bpk Bastian menyampaikan agar Laporan EITI harus segera dikejar persetujuan agar dapat segera selesai. Untuk EITI Daerah, beberapa daerah sudah ada yang menanyakan pelaksanaan di daerah. Bpk Bastian menutup rapat dengan menyampaikan agar semua keputusan rapat agar ditindaklanjuti

#### **D. HASIL KESEPAKATAN RAPAT**

1. Tim Pelaksana EITI menyetujui Laporan EITI 2014 dengan beberapa catatan. Catatan yang bersifat minor dan yang memungkinkan akan ditindaklanjuti, dan yang belum memungkinkan akan dimasukkan dalam rekomendasi laporan EITI 2014.
2. Tim Pelaksana yang hadir akan menandatangani form persetujuan pada Laporan EITI 2014.
3. Akan dilaksanakan diskusi tentang Beneficial Ownership pada tanggal 2 Maret 2017.
4. Akan diadakan diskusi/FGD tentang EITI Daerah di tingkat Tim Pelaksana sebelum Sekretariat EITI berkunjung ke daerah untuk pelaksanaan.